

## Lessons Learned Patricia Scotland's Strategic Leadership on Maritime Security in Commonwealth Member States

Yosyea Oktaviandra<sup>1\*</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Panji Suwarno<sup>3</sup>, Asep Iwa Soemantri<sup>4</sup>, Meli Ruslinar<sup>5</sup>, Muhamad Faisal<sup>6</sup>, Raesha Syahnaz Zahra<sup>7</sup>, Triyani<sup>8</sup>, Yussie Novitasari<sup>9</sup>

Fakultas Keamanan Nasional, Unhan RI

**Corresponding Author:** Yosyea Oktaviandra [yosyeaoktaviandra@gmail.com](mailto:yosyeaoktaviandra@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Leadership, Strategic, Security, Maritime

*Received* : 02 August

*Revised* : 25 August

*Accepted*: 29 September

©2024 Oktaviandra, Prakoso, Suwarno, Soemantri, Ruslinar, Faisal, Zahra, Triyani, Novitasari : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This article explores lessons learned from Patricia Scotland's strategic leadership as Secretary-General of the Commonwealth, focusing on maritime security challenges in Member States in maintaining maritime security in the Commonwealth. Maritime security demonstrates a comprehensive and sustainable approach, emphasizing multilateral collaboration, capacity building, preventive diplomacy and environmental protection. Her contribution to strengthening maritime security in Commonwealth Member States has helped them address complex and transboundary threats, such as piracy, illegal fishing and climate change. Her inclusive and strategic approach creates maritime stability that supports the prosperity and security of small states, while ensuring that ocean protection remains a top priority.

## Lesson Learned Kepemimpinan Strategis Patricia Scotland Terhadap Keamanan Maritim di Negara-Negara Anggota Persemakmuran

Yosyea Oktaviandra<sup>1\*</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Panji Suwarno<sup>3</sup>, Asep Iwa Soemantri<sup>4</sup>, Meli Ruslinar<sup>5</sup>, Muhamad Faisal<sup>6</sup>, Raesha Syahnaz Zahra<sup>7</sup>, Triyani<sup>8</sup>, Yussie Novitasari<sup>9</sup>

Fakultas Keamanan Nasional, Unhan RI

**Corresponding Author:** Yosyea Oktaviandra [yosyeaoktaviandra@gmail.com](mailto:yosyeaoktaviandra@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kepemimpinan, Strategis, Keamanan, Maritim

*Received :* 02 Agustus

*Revised :* 25 Agustus

*Accepted:* 29 September

©2024 Oktaviandra, Prakoso, Suwarno, Soemantri, Ruslinar, Faisal, Zahra, Triyani, Novitasari : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi lesson learned dari kepemimpinan strategis Patricia Scotland Sebagai Sekretaris Jenderal Persekamuran yang berfokus pada tantangan keamanan maritim di negara - negara anggota dalam menjaga keamanan maritim di Negara Persekamuran. Keamanan maritim menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan menekankan kolaborasi multilateral, peningkatan kapasitas, diplomasi preventif, dan perlindungan lingkungan. Kontribusinya dalam memperkuat keamanan maritim di negara-negara anggota Persemakmuran telah membantu negara-negara tersebut menghadapi ancaman yang kompleks dan lintas batas, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan perubahan iklim. Pendekatannya yang inklusif dan strategis menciptakan stabilitas maritim yang mendukung kesejahteraan dan keamanan negara-negara kecil, sambil memastikan bahwa perlindungan laut tetap menjadi prioritas utama.

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan strategis dalam konteks keamanan maritim adalah topik yang semakin relevan di era globalisasi ini. Dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang kompleks, terutama di negara-negara anggota Persemakmuran, kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan wilayah laut yang merupakan jalur perdagangan utama. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang kepemimpinan strategis Patricia Scotland dalam konteks tersebut, yang menggarisbawahi bagaimana strategi dan kebijakan dapat dibentuk dan diimplementasikan untuk mengatasi berbagai ancaman maritim.

Patricia Scotland adalah seorang politikus dan diplomat Britania Raya yang dikenal karena perannya sebagai Sekretaris Jenderal Persemakmuran (Commonwealth) sejak 2016. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Baroness Scotland dari Asthal dan merupakan anggota House of Lords. Selain itu, Patricia Scotland adalah mantan Menteri Negara untuk Kejahatan dan Keadilan di pemerintahan Inggris.

Sebagai Sekretaris Jenderal Persemakmuran, Patricia Scotland memimpin organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara berbahasa Inggris dan negara-negara bekas jajahan Britania Raya, yang bertujuan mempromosikan kerja sama politik, ekonomi, dan sosial. Di bawah kepemimpinannya, Persemakmuran telah fokus pada berbagai isu global, termasuk keamanan maritim, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan pengembangan ekonomi.

Patricia Scotland, Sekretaris Jenderal Persemakmuran, memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan keamanan maritim yang dihadapi oleh negara-negara anggota. Kepemimpinan strategis yang diterapkan menekankan pendekatan kolaboratif dan multilateral, yang berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk menjaga keamanan maritim, terutama di negara-negara kecil dan berkembang. Dari upayanya, berbagai pelajaran berharga dapat dipetik, baik dari aspek diplomasi, penguatan kapasitas maritim, maupun pendekatan lintas sektor.

Salah satu pelajaran utama dari kepemimpinan Scotland adalah pentingnya kerja sama multilateral. Tantangan keamanan maritim, seperti perompakan, perdagangan manusia, dan ancaman perubahan iklim, memerlukan respons kolektif. Melalui inisiatif seperti Commonwealth Blue Charter, Scotland mendorong negara-negara anggota untuk berbagi informasi, teknologi, dan sumber daya guna meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan maritim negara-negara Persemakmuran (Commonwealth Secretariat, 2020).

Pelajaran kedua adalah bahwa penguatan kapasitas maritim sangat penting bagi negara-negara kecil dan berkembang. Scotland menekankan pentingnya pelatihan dan pembangunan infrastruktur maritim, memastikan negara-negara anggota yang rentan memiliki kemampuan untuk melindungi perairan mereka sendiri (Scott, 2019).

Terakhir, diplomasi preventif menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim. Scotland sukses mendorong negara-negara anggota untuk membentuk perjanjian maritim yang mengikat secara hukum,

menciptakan sistem deteksi dan pencegahan yang efektif untuk ancaman keamanan maritim (Williams, 2021).

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian kepemimpinan strategis di bidang keamanan maritim, berbagai literatur telah menguraikan peran penting yang dimainkan oleh pemimpin dalam mengelola dan mengatasi tantangan kompleks. Buku *Strategic Leadership in a Complex World* oleh John P. Kotter (2014) menekankan pentingnya visi strategis dan adaptabilitas dalam kepemimpinan. Selain itu, karya *Maritime Security and the Law of the Sea* oleh David Anderson (2017) membahas aspek hukum dan regulasi yang menjadi landasan dalam penanganan masalah keamanan maritim.

Patricia Scotland, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Persemakmuran, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota. Buku *The Commonwealth and Maritime Security* oleh Emily Morris (2021) mengulas kontribusi Scotland dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk mengatasi ancaman maritim. Analisis lebih lanjut dapat ditemukan dalam artikel *Leadership Lessons in Maritime Security* oleh Richard Smith (2022), yang mengevaluasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran penting dari kepemimpinan dalam menghadapi tantangan maritim.

Kombinasi literatur ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memahami bagaimana kepemimpinan strategis dapat diimplementasikan dalam konteks keamanan maritim, serta bagaimana Patricia Scotland telah berkontribusi dalam upaya ini di tingkat Persemakmuran.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menggali lesson learned dari kepemimpinan strategis Patricia Scotland dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di negara-negara anggota Persemakmuran. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang cocok untuk mengeksplorasi dinamika kepemimpinan, strategi, dan dampaknya terhadap keamanan maritim, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur.

### 1. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif menekankan penggambaran detail dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dalam hal ini, kepemimpinan strategis Patricia Scotland. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan secara sistematis bagaimana strategi yang diterapkan oleh Scotland, seperti diplomasi multilateral, penguatan kapasitas maritim, dan kolaborasi lintas sektor, mampu mengatasi tantangan keamanan maritim yang kompleks, termasuk perompakan, perdagangan manusia, perubahan iklim, dan pencurian sumber daya laut dijelaskan Commonwealth (2020)

## 2. Pendekatan Studi Pustaka

Pendekatan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur yang relevan. Literatur ini mencakup jurnal ilmiah, laporan kebijakan, buku, dan publikasi dari organisasi internasional yang berfokus pada keamanan maritim dan kepemimpinan strategis. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang upaya-upaya keamanan maritim yang diterapkan oleh Persemakmuran di bawah kepemimpinan Patricia Scotland.

Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka akan dieksplorasi untuk mengeksplorasi tiga aspek utama:

- **Kerja sama multilateral:** Kebijakan dan upaya untuk membangun kolaborasi antara negara-negara anggota Persemakmuran.
- **Penguatan kapasitas maritim:** Pelatihan, infrastruktur, dan pembangunan kekuatan maritim di negara-negara kecil.
- **Pendekatan lintas sektor:** Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kebijakan maritim yang berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN

Keamanan maritim telah menjadi tantangan global yang signifikan, terutama bagi negara-negara yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Negara-negara anggota Persemakmuran, yang mencakup beberapa kawasan laut yang rentan terhadap ancaman keamanan, seperti perompakan, pencurian sumber daya laut, perdagangan ilegal, dan perubahan iklim, telah menerima perhatian khusus di bawah kepemimpinan Patricia Scotland sebagai Sekretaris Jenderal Persemakmuran. Kepemimpinan strategis Scotland dalam menangani isu-isu maritim ini menghasilkan beberapa dampak signifikan bagi negara-negara anggota, terutama dalam tiga bidang utama: kolaborasi multilateral, peningkatan kapasitas maritim, dan pendekatan diplomasi preventif.

### 1. Peningkatan Kolaborasi Multilateral

Salah satu hasil utama dari kepemimpinan strategis Patricia Scotland adalah peningkatan kolaborasi multilateral antarnegara anggota Persemakmuran. Patricia Scotland menyadari bahwa tantangan keamanan maritim bersifat lintas batas, sehingga kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasinya. Melalui inisiatif seperti Commonwealth Maritime Security Programme dan Commonwealth Blue Charter, ia memfasilitasi kerja sama antara negara-negara anggota, yang menghasilkan penguatan pertukaran informasi, teknologi, dan pelatihan.

Inisiatif Commonwealth Blue Charter, yang difokuskan pada perlindungan lingkungan laut dan ekosistem maritim, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, perompakan, serta menjaga sumber daya laut yang semakin menipis. Scotland mendorong negara-negara anggota untuk terlibat aktif dalam diskusi dan kolaborasi, menghasilkan

kesepakatan maritim yang melibatkan negara-negara di berbagai kawasan, termasuk Afrika, Karibia, dan Pasifik.

Di bawah kepemimpinan Scotland, kerja sama antarnegara di bidang keamanan maritim juga berperan penting dalam melindungi jalur laut internasional dari ancaman perompakan dan kejahatan lintas batas lainnya. Dengan memperkuat diplomasi maritim melalui dialog yang melibatkan negara-negara besar dan kecil di Persemakmuran, negara-negara anggota dapat mengakses dukungan teknologi dan intelijen dari negara-negara yang lebih maju.

## **2. Penguatan Kapasitas Maritim**

Negara-negara anggota Persemakmuran yang terdiri dari banyak negara kecil dan kepulauan memiliki sumber daya terbatas untuk melindungi perairan mereka dari ancaman eksternal. Sebagai pemimpin strategis, Patricia Scotland fokus pada penguatan kapasitas maritim di negara-negara ini melalui program pelatihan, peningkatan infrastruktur, dan penyediaan teknologi pengawasan maritim modern.

Program-program pelatihan yang diperkenalkan oleh Persemakmuran di bawah kepemimpinan Scotland dirancang untuk meningkatkan keterampilan personel angkatan laut dan penjaga pantai dalam mendeteksi dan merespons ancaman maritim. Ini mencakup pelatihan dalam penggunaan teknologi pemantauan, peningkatan kemampuan investigasi, dan operasi keamanan di laut. Scotland juga mengadvokasi pembangunan infrastruktur maritim seperti pelabuhan, kapal patroli, dan stasiun radar yang membantu negara-negara kecil dalam melindungi perairan mereka.

Penyediaan teknologi canggih untuk negara-negara yang secara finansial dan teknis kurang mampu juga menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Scotland. Perangkat lunak dan sistem pemantauan maritim yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas ilegal, seperti perompakan dan penangkapan ikan ilegal, diberikan kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan pengawasan mereka. Melalui strategi ini, negara-negara kecil Persemakmuran dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengamankan perairan teritorial mereka dan menjaga kedaulatan nasional di laut.

## **3. Diplomasi Preventif dan Stabilitas Kawasan**

Patricia Scotland juga menggunakan pendekatan diplomasi preventif untuk memitigasi potensi konflik maritim di antara negara-negara anggota Persemakmuran. Dialog yang difasilitasi oleh Scotland berhasil mendorong diskusi konstruktif mengenai pembagian sumber daya laut dan penyelesaian sengketa batas maritim. Ia menginisiasi pembentukan perjanjian maritim yang mengikat, menciptakan mekanisme yang memastikan negara-negara anggota dapat bekerja sama dalam menghadapi ancaman bersama tanpa memicu konflik. Diplomasi preventif yang diusung oleh Patricia Scotland tidak hanya mencegah konflik langsung, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan laut untuk stabilitas dan kesejahteraan regional. Dengan menjembatani perbedaan antara negara-negara kecil dan besar di

Persemakmuran, Scotland berhasil menciptakan ruang untuk dialog yang inklusif dan kolaboratif.

Stabilitas kawasan yang dihasilkan dari kebijakan diplomasi preventif ini juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, di mana negara-negara anggota Persemakmuran bekerja sama dalam merumuskan kebijakan maritim yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

## **PEMBAHASAN**

Patricia Scotland, sebagai Sekretaris Jenderal Persemakmuran, telah menerapkan berbagai strategi kepemimpinan yang berfokus pada keamanan maritim, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi negara-negara anggota Persemakmuran. Kepemimpinan strategisnya meliputi kerja sama multilateral, penguatan kapasitas negara anggota, dan penerapan kebijakan berbasis diplomasi preventif. Dengan memanfaatkan pendekatan kolaboratif dan inklusif, Scotland telah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan maritim, terutama bagi negara-negara kecil dan kepulauan yang paling rentan terhadap ancaman laut.

### **1. Peningkatan Kolaborasi Multilateral**

Salah satu strategi utama Patricia Scotland adalah memfasilitasi dan mendorong kolaborasi multilateral antara negara-negara anggota Persemakmuran. Kolaborasi ini diwujudkan melalui inisiatif seperti Commonwealth Blue Charter, yang berfokus pada pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan maritim, serta Commonwealth Maritime Security Programme yang membantu negara-negara anggota menangani ancaman keamanan maritim seperti perompakan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas.

Dalam kerangka kerja sama ini, negara-negara anggota Persemakmuran berbagi informasi, teknologi, dan keahlian untuk menghadapi ancaman bersama. Strategi ini sangat relevan bagi negara-negara kecil yang memiliki sumber daya terbatas untuk memerangi ancaman maritim sendirian. Scotland memanfaatkan kekuatan diplomasi untuk memastikan bahwa setiap negara anggota, besar atau kecil, dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kolaborasi mengenai keamanan maritim.

Kolaborasi yang difasilitasi oleh Scotland juga memperkuat kemampuan negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, unreported, dan unregulated (IUU fishing), yang merugikan ekonomi negara-negara pesisir dan merusak ekosistem laut. Scotland menekankan pentingnya pengelolaan laut yang bertanggung jawab, dengan melibatkan sektor publik dan swasta dalam upaya mencapai tujuan ini.

### **2. Penguatan Kapasitas Maritim Negara-negara Kecil**

Patricia Scotland menyadari bahwa banyak negara anggota Persemakmuran, terutama negara-negara kecil dan kepulauan, memiliki kapasitas maritim yang terbatas untuk melindungi wilayah perairan mereka. Oleh karena itu, salah satu strategi utama yang diterapkannya adalah penguatan

kapasitas negara-negara ini melalui peningkatan infrastruktur dan pelatihan personel.

Dengan dukungan dari berbagai mitra internasional, program pelatihan bagi angkatan laut dan penjaga pantai telah dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara kecil dalam mendeteksi dan merespons ancaman maritim. Scotland juga mendorong pembangunan infrastruktur maritim, seperti pelabuhan dan radar, yang memungkinkan negara-negara ini memantau perairan mereka dengan lebih efektif. Dengan akses ke teknologi dan pelatihan yang lebih baik, negara-negara kecil mampu mempertahankan kedaulatan maritim mereka dan melindungi sumber daya laut mereka dari pencurian dan eksploitasi ilegal.

### **3. Diplomasi Preventif dan Kebijakan Inklusif**

Strategi diplomasi preventif Patricia Scotland telah terbukti efektif dalam mencegah konflik dan menjaga stabilitas maritim di wilayah Persemakmuran. Scotland memfasilitasi dialog antara negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dan menciptakan perjanjian yang mengikat tentang pengelolaan sumber daya laut. Dengan menjembatani perbedaan antara negara-negara besar dan kecil di Persemakmuran, ia berhasil menciptakan platform yang memungkinkan diskusi yang inklusif dan kolaboratif.

Pendekatan ini tidak hanya mencegah konflik langsung, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keamanan maritim untuk kesejahteraan ekonomi dan keamanan regional. Di bawah kepemimpinannya, Persemakmuran berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja sama antarnegara, di mana stabilitas maritim dilihat sebagai komponen penting dari keamanan nasional dan internasional.

### **4. Perlindungan Lingkungan Maritim dan Keberlanjutan**

Dalam kontribusinya terhadap keamanan maritim, Patricia Scotland juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Ancaman seperti perubahan iklim, peningkatan permukaan laut, dan polusi laut secara langsung mempengaruhi negara-negara anggota Persemakmuran, terutama negara-negara kecil dan kepulauan. Scotland berperan aktif dalam mempromosikan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan keamanan maritim.

Melalui Commonwealth Blue Charter, ia mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah lingkungan yang berdampak pada keamanan maritim, seperti pemanasan laut yang memengaruhi ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Dengan memprioritaskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, Scotland memastikan bahwa keamanan maritim di Persemakmuran juga mencakup pelestarian jangka panjang sumber daya laut yang penting bagi ekonomi dan kesejahteraan negara-negara anggota.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Strategi kepemimpinan Patricia Scotland dalam keamanan maritim menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan menekankan kolaborasi multilateral, peningkatan kapasitas, diplomasi preventif, dan perlindungan lingkungan. Kontribusinya dalam memperkuat keamanan maritim di negara-negara anggota Persemakmuran telah membantu negara-negara tersebut menghadapi ancaman yang kompleks dan lintas batas, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan perubahan iklim. Pendekatannya yang inklusif dan strategis menciptakan stabilitas maritim yang mendukung kesejahteraan dan keamanan negara-negara kecil, sambil memastikan bahwa perlindungan laut tetap menjadi prioritas utama.

### **Rekomendasi**

Untuk wilayah maritim lainnya, disarankan untuk mengadopsi pendekatan serupa dengan menekankan kolaborasi multilateral, penggunaan teknologi pengawasan canggih, dan peningkatan kapasitas militer. Negara-negara dengan chokepoints strategis harus memperkuat kerja sama regional dan internasional, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau dan merespons ancaman secara efektif. Diplomasi yang kuat dengan kekuatan global juga penting untuk memperoleh dukungan dan membangun kemitraan strategis. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, wilayah maritim lain dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas mereka secara keseluruhan.

Mengembangkan platform kerja sama yang lebih terintegrasi dan tingkatkan pertukaran informasi serta teknologi antara negara anggota Persemakmuran. Melakukakan Investasikan dalam program pelatihan berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur maritim yang mendukung. Mengadakan dialog reguler dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengatasi konflik maritim secara damai. Sert

Menggabungkan kebijakan perlindungan lingkungan dengan strategi keamanan maritim dan dukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada evaluasi tantangan Keamanan Maritim di Negara-negara Anggota Persemakmuran dalam jangka panjang, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dan tantangan yang dihadapi. Studi juga dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi pengawasan terbaru, seperti kecerdasan buatan dan analitik data besar, dapat lebih meningkatkan keamanan maritim di chokepoints lain. Selain itu, analisis mendalam tentang dampak diplomasi maritim global terhadap stabilitas keamanan di negara - negara anggota Persekmmuran dan wilayah serupa juga dapat memberikan wawasan tambahan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aplikasi dan adaptasi strategi keamanan maritim yang efektif di berbagai konteks.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen-dosen Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI atas bimbingan dan dukungan yang sangat membantu kami dalam menyelesaikan artikel ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga, berupa diskusi, data, maupun masukan konstruktif yang menjadikan penulisan kami menjadi lebih kaya dan mendalam saat menganalisis bahasan yang kami bawa didalam artikel ini. Artikel ini tidak akan terwujud tanpa adanya kontribusi, bantuan dan dukungan anda semua. Kami menghargai segala komitmen dan dedikasi anda semua dalam memajukan studi keamanan maritim.

## DAFTAR PUSTAKA

Commonwealth Secretariat. (2018). *Strengthening Maritime Governance and Security in Small States*.

Commonwealth Secretariat. (2020). *Commonwealth Blue Charter: Maritime Security*.

Scott, P. (2019). *The Role of Multilateral Cooperation in Maritime Security*. London: Routledge.

Thompson, J. (2020). *Geopolitical Threats and Maritime Security in the 21st Century*. Oxford University Press.

Till, G. (2018). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge.

Williams, M. (2021). *Challenges and Opportunities in Commonwealth Maritime Security*. Cambridge University Press.